

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari agenda nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Menurut Musgrave (1959), salah satu fungsi keuangan publik adalah fungsi distribusi, yang menekankan bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber daya agar tercapai keseimbangan sosial-ekonomi antar lapisan masyarakat. Prinsip ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan fiskal yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan. Kota Payakumbuh, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat, terus berupaya memperkuat fondasi ekonominya melalui peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi pengeluaran pemerintah. Dua dekade terakhir, arah kebijakan fiskal di kota ini mengalami transformasi signifikan, terutama dalam penataan program pengentasan kemiskinan yang lebih terukur, berbasis data, dan berkelanjutan (Bappeda Kota Payakumbuh, 2024).

Perekonomian Payakumbuh sejak 2010 menunjukkan kinerja yang stabil dan berkelanjutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Payakumbuh, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp 7,48 triliun pada 2010 menjadi Rp 14,59 triliun pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan ekspansi ekonomi daerah yang ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta pertanian perkotaan. Aktivitas ekonomi yang tumbuh pesat ini menandakan adanya pergeseran struktur ekonomi menuju sektor non-pertanian. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Todaro & Smith (2015) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi modern di negara berkembang biasanya ditandai oleh diversifikasi sektor produksi dan peningkatan peran sektor jasa.

Meskipun pertumbuhan ekonomi terlihat positif, peningkatan ini belum sepenuhnya mampu menghapus kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Sebagian besar penduduk berpendapatan rendah masih bergantung pada sektor informal dengan tingkat produktivitas yang rendah. Keterbatasan akses terhadap modal usaha, pendidikan, dan pelatihan keterampilan menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Pandangan Todaro & Smith (2015) memperkuat bahwa kemiskinan bukan semata-mata akibat rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi dan sosial yang produktif. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Payakumbuh menempatkan isu kemiskinan sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sejalan dengan hal itu, Bappeda Kota Payakumbuh mencatat peningkatan belanja daerah yang cukup konsisten, dari Rp 560,8 miliar pada 2010 menjadi Rp 889,2 miliar pada 2023. Sebagian besar belanja difokuskan pada sektor pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan program perlindungan sosial seperti Program Payakumbuh Sejahtera. Pola belanja yang berpihak pada masyarakat berpendapatan rendah menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjalankan fungsi distribusi fiskal sebagaimana dikemukakan oleh Musgrave (1959). Peningkatan pengeluaran publik yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi memperkuat bukti empiris Hukum Wagner (1883), yang menyatakan bahwa belanja pemerintah akan meningkat seiring dengan naiknya pendapatan masyarakat. Kota Payakumbuh, pola ini terlihat dari pengeluaran pemerintah yang mengikuti ekspansi ekonomi daerah.

Setiap kenaikan PDRB mendorong pemerintah memperbesar alokasi belanja publik, sementara belanja publik yang efisien memberikan efek positif terhadap pertumbuhan PDRB melalui program produktif, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Finuliyah & Khusaini (2022). Hubungan timbal balik antara PDRB dan pengeluaran pemerintah dianalisis menggunakan metode kausalitas Granger (1969), yang memungkinkan prediksi arah pengaruh antar variabel berdasarkan data masa lalu. Selain itu, penelitian Rifqah Harahap et

al. (2025) dan Asnidar et al (2025) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia. Temuan ini sejalan dengan Alesina & Ardagna (2010), yang menyatakan bahwa perubahan kebijakan fiskal yang tepat dapat memberikan dampak nyata dalam mengurangi kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan di Kota Payakumbuh kini difokuskan pada pengurangan kemiskinan ekstrem, peningkatan inklusi keuangan, dan digitalisasi sektor ekonomi mikro agar masyarakat berpenghasilan rendah lebih produktif dan berdaya saing (Bappeda Kota Payakumbuh, 2023; Bappenas, 2021). Peningkatan belanja publik yang diikuti koordinasi antar sektor menunjukkan bahwa pemerintah kota mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan sosial secara harmonis. Tantangan ke depan adalah memastikan kemiskinan struktural benar-benar teratasi melalui integrasi program pemberdayaan ekonomi, reformasi penganggaran berbasis kinerja, dan inovasi pelayanan publik.



Sumber : Laporan Pertanggung jawaban APBD (LKPJ/APBD) Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2010–2023

Gambar 1.1 Tren Pengeluaran Pemerintah Kota Payakumbuh (2010–2023)

Gambar 1.1 memperlihatkan perkembangan pengeluaran pemerintah Kota Payakumbuh yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun terjadi fluktuasi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Tren ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja publik seiring dinamika ekonomi daerah. Peningkatan belanja difokuskan pada sektor produktif, pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial, sesuai temuan penelitian Rifqah Harahap et al. (2025) dan Asnidar et al. (2025) yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran pada sektor strategis berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia. Pola ini juga konsisten dengan Hukum Wagner (1883) dan teori distribusi fiskal Musgrave (1959), yang menekankan bahwa pengeluaran publik akan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan menjadi instrumen penting dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat.

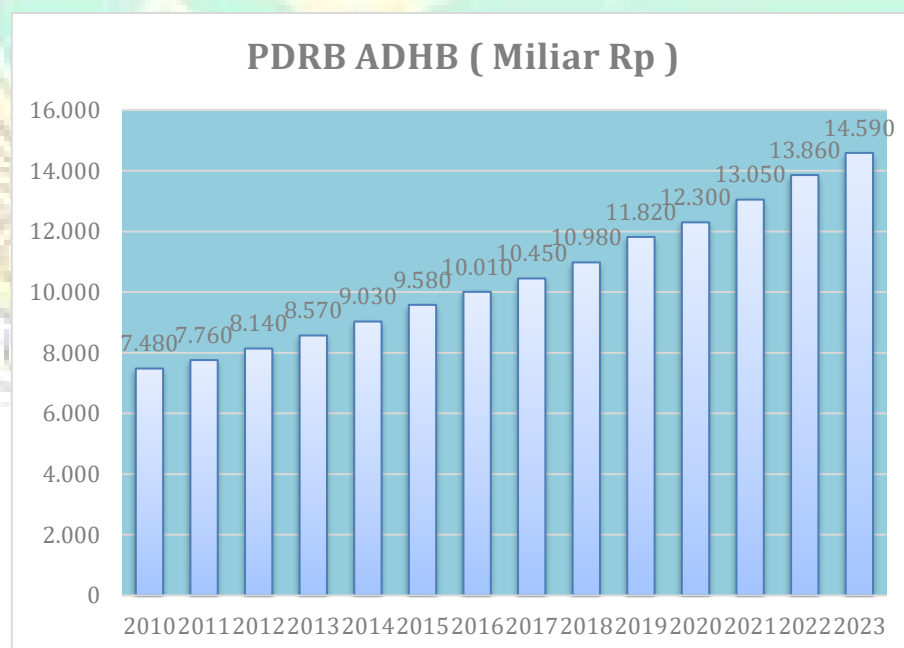


Sumber : BPS Kota Payakumbuh Tahun 2023

Gambar 1.2 Tren Tingkat Kemiskinan Kota Payakumbuh Tahun 2010-2023

Gambar 1.2 memperlihatkan tren penurunan tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh selama periode 2010–2023, meskipun terdapat lonjakan sementara pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Secara umum, tren menurun ini menunjukkan efektivitas kebijakan pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah. Fenomena ini sejalan dengan temuan Todaro & Smith (2015), yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menurunkan kemiskinan tanpa adanya intervensi pemerintah melalui pengeluaran publik yang diarahkan pada sektor produktif dan sosial. Peningkatan belanja publik untuk pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kesempatan ekonomi dan layanan dasar, sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan secara bertahap.

Penelitian Rifqah Harahap et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan kemiskinan. Hal ini memperkuat bukti empiris bahwa strategi fiskal yang tepat dapat menjadi alat efektif dalam pengentasan kemiskinan, sebagaimana didukung oleh penelitian Asnidar et al. (2025) dan Witri Shintia Amanda et al. (2025).



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh (2023); Bappeda Kota Payakumbuh (2010 – 2023)

Gambar 1.3 Tren PDRB Kota Payakumbuh (2010 – 2023)

Gambar 1.3 menunjukkan tren peningkatan PDRB Kota Payakumbuh dari Rp 7,48 triliun pada 2010 menjadi Rp 14,59 triliun pada 2023. Terlihat bahwa setiap kenaikan PDRB hampir selalu diikuti peningkatan pengeluaran pemerintah, mencerminkan adanya hubungan positif dan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan alokasi belanja publik. Fenomena ini sejalan dengan Hukum Wagner (1883), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mendorong meningkatnya peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan keuangan dan pengeluaran pemerintah, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menyampaikan bahwa LKPJ mencakup kebijakan pemerintah daerah, realisasi pendapatan dan belanja, serta pelaksanaan program strategis di berbagai sektor sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah diposisikan sebagai instrumen utama dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Payakumbuh. Lebih lanjut, Elzadaswarman menyatakan bahwa realisasi pendapatan daerah Kota Payakumbuh telah melampaui target yang ditetapkan, sementara belanja daerah realisasi lebih dari 90 persen dari total anggaran. Ia menegaskan bahwa meskipun serapan belanja belum sepenuhnya mencapai target, pemerintah daerah memastikan bahwa alokasi anggaran digunakan secara efektif dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Hal ini mengindikasikan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengeluaran pemerintah guna mendorong aktivitas ekonomi daerah dan menopang peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Realisasi belanja daerah yang didominasi oleh urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan pelayanan dasar, mencerminkan strategi pemerintah daerah dalam mengaitkan pengeluaran pemerintah dengan upaya penurunan tingkat kemiskinan. Alokasi belanja pada pembangunan fisik dan sektor penunjang pemerintahan juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari peningkatan PDRB Kota Payakumbuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki peran ganda, yaitu sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan. Hubungan antara peningkatan PDRB, pengeluaran pemerintah, dan penurunan tingkat kemiskinan tidak selalu berjalan secara linear.

Praktik pemerintahan daerah, arah pengeluaran pemerintah sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan preferensi kepala daerah sebagai pengambil keputusan utama. Teori Ekonomi Pilihan Publik (Public Choice Theory) yang dikemukakan oleh Buchanan (1962) menjelaskan bahwa kebijakan anggaran merupakan hasil interaksi antara pertimbangan ekonomi dan kepentingan politik. Kepala daerah cenderung memprioritaskan program-program yang hasilnya mudah diamati oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, sehingga sebagian pengeluaran pemerintah lebih diarahkan pada pembangunan fisik dan program jangka pendek. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Rifqah Harahap et al. (2025) menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun dampaknya terhadap penurunan kemiskinan sangat bergantung pada komposisi dan kualitas belanja publik. Asnidar et al. (2025) juga menemukan bahwa belanja pemerintah yang difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dibandingkan belanja yang bersifat administratif atau jangka pendek.

Dengan demikian, pernyataan pemerintah daerah dan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah, PDRB, dan tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan kepala daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis secara empiris hubungan kausalitas antara PDRB, pengeluaran pemerintah, dan tingkat kemiskinan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan fiskal daerah di Kota Payakumbuh.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan timbal balik antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh ?
2. Bagaimana hubungan timbal balik antara PDRB dan pengeluaran pemerintah di Kota Payakumbuh?
3. Bagaimana hubungan timbal balik antara PDRB dan Tingkat Kemiskinan di Kota Payakumbuh ?
4. Bagaimana keberlakuan hukum Wagner's law di Kota Payakumbuh ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis hubungan timbal balik antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh.
2. Menganalisis hubungan timbal balik antara PDRB dan pengeluaran pemerintah di Kota Payakumbuh.
3. Menganalisis hubungan timbal balik antara PDRB dan tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh.
4. Menganalisis keberlakuan hukum Wagner's law di Kota Payakumbuh.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur di bidang ekonomi publik dan ekonomi pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian ini dapat memperkuat bukti empiris mengenai keberlakuan hukum Wagner (1883) di tingkat daerah, sekaligus memberikan pembandingan terhadap temuan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada level nasional Sukartini & Saleh (2012). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai kebijakan fiskal daerah, fungsi distribusi keuangan publik Musgrave (1959), serta peran belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Secara metodologis, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam penerapan uji kausalitas Granger untuk menganalisis arah hubungan antar variabel ekonomi daerah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menyusun kebijakan fiskal yang efektif dan berpihak pada masyarakat. Pemahaman yang lebih baik mengenai pengaruh PDRB dan pengeluaran pemerintah dapat membantu perencanaan anggaran yang berkelanjutan, mendukung pengentasan kemiskinan, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta tujuan ke-10 tentang pengurangan kesenjangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pengeluaran pemerintah di Kota Payakumbuh selama periode 2010–2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data tahunan PDRB atas dasar harga konstan serta total

pengeluaran pemerintah daerah yang diperoleh dari publikasi resmi BPS dan DJPK. Analisis yang digunakan berfokus pada pendekatan kuantitatif time series dengan metode deskriptif dan uji kausalitas Granger untuk melihat arah hubungan kedua variabel. Penelitian ini tidak menganalisis faktor-faktor lain di luar PDRB dan pengeluaran pemerintah, serta tidak mencakup perbandingan antar daerah. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian terbatas pada satu wilayah (Payakumbuh), dua variabel utama, dan periode waktu 14 tahun.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari: Bab 1 Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, dan Bab V Penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori dan penelitian terdahulu yang menjadi pendukung penelitian ini. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka terbentuk suatu kerangka pemikiran. Bab ini juga berisi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab metode penelitian ini berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, definisi operasional, data dan sumber data, populasi dan sampel, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas gambaran umum tentang perkembangan variabel penelitian, hasil pengolahan data menggunakan metode *Vector Autoregression* (VAR) dan uji Kausalitas Granger untuk melihat hubungan antara PDRB, pengeluaran pemerintah, dan tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjadi bab terakhir dalam penelitian yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang didapatkan.

